

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik seperti yang telah disebutkan didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Indonesia disebut sebagai Negara kesatuan karena terdiri dari beberapa pulau besar yang tersebar di wilayah Indonesia dari sabang sampai marauke yang kaya dengan sumber daya alam di dalamnya. Mengingat Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil yang wilayahnya sangat besar sehingga menyebabkan Indonesia terdiri dari beberapa Provinsi yang memiliki luas wilayah berbeda dan pemerintahan berbeda juga antara Provinsi satu dengan Provinsi yang lainnya. Di dalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintahan daerah diberi wewenang penuh oleh pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Jadi pemerintahan daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya menurut Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Bagian dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang terdiri dari suatu kesatuan: tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga pada level terendahnya tingkat desa atau kelurahan. Kontek ini pemerintahan desa adalah sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintahan kecamatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga-lembaga dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Lembaga tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Pembagian fungsi dan kewenangan lembaga Negara di Indonesia tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat saja, tetapi juga di pemerintahan desa. Di pemerintahan desa juga terdapat aparat-aparat atau perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Begitu pula di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut masyarakat mengharapkan implementasi otonomi daerah terutama masyarakat tingkat desa. Untuk mewujudkan maka dibentuklah suatu lembaga desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai landasan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagaimana yang terdapat pada desa-desa lain, Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis juga memiliki BPD. Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa BPD tersebut memiliki beberapa anggota. Sesuai dengan PERDA Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang BPD pasal 8 menyebutkan bahwa jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Desa Tasik Serai memiliki jumlah anggota BPD saat ini berjumlah 9 (Sembilan) orang. Berikut ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Anggota BPD di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1	Namcan Tambunan	Ketua BPD	Parpol
2	Rudi Aprianto	Wakil Ketua BPD	T. Masyarakat
3	Norhaidar	Sekretaris	T. Wanita
4	Bobby Situngkir	Ket Bidang Pemerintahan	T. Masyarakat
5	Zuhri Permata	Anggota BPD	T. Masyarakat
6	Suparwadi G	Ket Bidang Ekonomi	T. Pemuda
7	Omris Nainggolan	Anggota BPD	T. Masyarakat
8	Suyatno	Ket Bidang Kesejahteraan	T. Masyarakat
9	Kiba Erwan	Anggota BPD	T. Masyarakat

Sumber : Kantor BPD Desa Tasik Serai Tahun 2017

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan Desa di sebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, selanjutnya disebutkan adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Selanjutnya dalam pasal 29 Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Kelurahan menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam kerangka sebagai penyelenggara pemerintahan desa BPD mempunyai fungsi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 3 yaitu Fungsi BPD adalah menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan PP NO 72 Tahun 2005 tentang desa dan kelurahan Pasal 34 tentang BPD.

Fungsi Legislasi yaitu pembuatan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan Desa yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, harapan serta keterlibatan seluruh warga masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Dalam setiap pembentukan Peraturan Desa diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan desa dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis sesuai dengan tata tertib BPD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Badan Permusyawaratan Desa:

1. Kedudukan BPD

- a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

2. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

BPD sebagai badan legislasi Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang

sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datang hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.

3. Wewenang BPD

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa;

- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspirasi masyarakat;

f. Menyusun tata tertib BPD;

g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian

Perangkat Desa lainnya;

h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau menggabungkan desa atau perubahan

status desa menjadi kelurahan;

i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

Dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 yang telah disebutkan diatas, BPD di Desa Tasik Serai dapat menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Tasik Serai harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Desa dan BPD akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang.

Salah satu perubahan yang fundamental sebagai konsekuensi dari implementasi otonomi daerah, yaitu terjadinya pergeseran struktur politik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan desa. Hal ini diantaranya ditandai dengan perubahan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terlebih semenjak disahkannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Jika sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut, BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka saat ini berubah menjadi lembaga desa. Perubahan ini tentu diharapkan dapat memberikan dinamika dan suasana politik yang demokratis, otonom, independen, dan sekaligus prospektif dalam mempercepat keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dengan perubahan kedudukan itu, BPD juga diharapkan dapat menjadi wadah dalam pembuatan kebijakan publik, serta alat control bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya yang diatur didalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dapat dilihat bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kini yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Desa, sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta yang terdiri kepala desa, perangkat desa, kelompok dan tokoh masyarakat. Dari uraian tersebut jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, karena kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejajar dengan pemerintahn desa jika dilihat dari fungsi dan wewenangnya, yaitu fungsi legislasi, menjaring aspirasi masyarakat, dan pengawasan. Fungsi pengawasan disini adalah mencakup pengawasan terhadap semua kinerja ya di lakukan oleh Kepala Desa, pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap peraturan desa, keputusan Kepala Desa, serta program kerja desa yaitu dari pelaksanaan Peraturan Desa oleh pemerintahan desa.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan bahwa Peraturan Desa merupakan semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah di musyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa. Supaya peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan mufakat antara pemerintahan desa dengan badan perwakilan desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tatacara pegesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di desa.

Perturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam rapat membahas Anggaran APBDes menetapkan :
 - a. Retribusi Non Plasma dikenakan pungutan sebesar RP.6000/1bulan/Kepala Keluarga
 - b. Perawatan makam. Bagi seluruh warga desa tasik serai dikenakan biaya perawatan makam sebesar 2kg/1 dipungut setiap 3 bulan sekali (1kg/6bulan)
2. Dalam rapat membentuk kepengurusan baru LINMAS menetapkan :
 - a. Saudara untuk sebagai ketua danton
 - b. Saudara tumijan sebagai wakil danton
 - c. Saudara sias sebagai sekertaris merangkap bendahara.
3. Dalam rapat membahas 5 pilar adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan ahklaq dan moral
 - b. Peningkatan ekonomi kerakyatan.
 - c. Peningkatan sumber daya manusia
 - d. Peningkatan pelayanan kesehatan
 - e. Peningkatan insfratraktur

Dengan hasil :

 - a. Kadus IV Asry: pembagunan jembatan jalur timur 6b, jalur selatan, 4b dan penerangan kuburan
 - b. Bapak Sitompul Kepala sekolah SMP pembuatan pagar sekolah, pembuatan kantor dan toilet
 - c. Syamsudin : renovasi TK R.A

Tabel 1.2 : Kegiatan BPD di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

No	Tentang	Pelaksana	Pokok-poko kegiatan	Hasil kegiatan	Ket.
1	Pengawasan terhadap pembangunan pagar disekitar kantor beserta desa	-	Melihat langsung ke lokasi pembangunan	Telah terlaksana	-
2	tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat	Seluruh anggota BPD dan aparat desa	Rapat	Belum terlaksana	Tidak ada koordinasi
3	Pelaksanaan administrasi BPD	Seluruh anggota BPD	Rapat kerja	belum terlaksana	Anggota banyak yang tidak hadir
4	Pengawasan terhadap pembelian perlengkapan kantor desa	-	Melihat langsung ke kantor desa	Kurang Maksimal	Perlengkapan kantor telah tiba di kantor
5	Pelaksanaan administrasi BPD	Seluruh anggota BPD dan aparat desa beserta peserta rapat	Rapat dengar pendapat	Belum terlaksana	Jadwal belum ditentukan dan tidak maksimal
6	Pelaksanaan administarsi BPD	Seluruh anggota BPD	Rapat pimpinan BPD	Belum terlaksana	-

Sumber : Kantor BPD Desa Tasik Serai Kec.pinggir Kab. Bengkalis

Dalam tabel tersebut terlihat ada 4 kegiatan dari 6 kegiatan yang belum dan tidak terlaksana. Hal ini terjadi karena anggota BPD kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dalam hal ini juga belum dilakukan penjangkaran aspirasi langsung kepada masyarakat. Contohnya pembangunan desa seperti perbaikan jalan dengan cara penimbunan, lorong parit tidak ada untuk pengairan, perbaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana umum yaitu pasar dan jalan dan penerangan dan lain sebagainya. (hasil wawancara kepala desa yaitu bapak Erwan S.Sos 30 maret 2017). Hala ini membuktikan bahwa kurang berfungsinya BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Dengan meperhatikan keberadaan BPD sebagai penampung dan penyalur apirasi masyarakat pada PP NO 72 Tahun 2005 tentang desa dan kelurahan serta pada PERDA kabupaten bengkalis NO 06 Tahun 2008 tentang BPD dikaitkan dengan tugas sehari-hari, maka belum sejalan dengan apa yang diinginkan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa khususnya terhadap kinerja Kepala Desa merupakan salah satu alasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk. Upaya pengawasan terhadap kinerja kepala desa di maksudkan mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan kurang optimal. Misalnya dalam hal pengawasan terhadap tugas Kepala Desa di dalam melaksanakan program kerja desa. Indikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa kurang optimal dapat dilihat dari program kerja dalam bidang pembangunan di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adanya ketimpangan dan ketidak merataanya pembangunan dimasing-masing wilayah Desa Tasik Serai Kecamatan Painggir Kabupaten Bengkalis.dapat dilihat pada table di bawah ini sarana dan prasarana di desa tasik serai sebagai berikut:

Tabel.1.3 Sarana dan Prasarana Desa di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/ Volume	Keterangan
1	Kantor Desa	1 unit	Baik
2	Gedung Puskesmas	1 unit	Baik
3	Pamsimas	1 unit	kurang Baik, pembangunan anggaran tahun 2012
4	Gedung SDN	5 unit	Baik
5	Gedung SLTP	1 unit	Baik
6	Gedung SMA 4 Pinggir	1 unit	Baik
7	Gedung Paud Islamiah	3 unit	Baik
8	Masjid	14 unit	Baik
9	Musholah	5 unit	Sebagian kurang baik
10	Jalan tembusan wilayah Barat	1,2 Km	Rusak berat
11	Jalan tembusan wilayah timur	1.2 km	Rusak
13	Jalan lingkungan	6 km	Rusak berat
14	Jalan kepersawahan	14 km	Rusak berat
15	WC SLTP	4 unit	Kurang layak
16	Kantor BPD	1 unit	Baik

Sumber : kantor Desa Tasik Serai 2014

Pada tabel diatas dijelaskan sarana dan prasarana di Desa Tasik Serai yaitu: adanya sebuah Gedung Kantor Desa yang kondisinya baik, gedung puskesmas 1 unit dengan kondisi baik, Pamsimas pembangunan anggaran 2012 yang kurang baik, gedung sekolah SD 8 unit, SLTP 1 unit, SMA 1 unit, SMP 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

unit dalam kondisi baik, terdapat Masjid sebanyak 4 buah dengan kondisi yang baik, dan mushalla 10 unit sebagian kondisinya kurang baik. Serta kondisi jalan tembusan wilayah barat di Desa Tasik serai sepanjang 1.2 km rusak berat, jalan menuju tembusan wilayah timur sepanjang 1.2 km rusak dan jalan lingkungan sepanjang 6 km rusak berat, serta jalan akses kepersawahan sepanjang 14 km rusak berat. Wc SLTP 4 unit dengan kondisi kurang baik, gedung kontr BPD satu unit dengan kondisi baik.

Table.1.4 Jumlah Penduduk Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

No	Dusun	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Pintu Padang/ seigeroggang	2115	31,39%
2	Brigin	1178	17,48%
3	Bagan Benio	475	7,05%
4	Sungai Buluh	1255	18,62%
5	Jambu Wangi	1714	25,44%
5	Jumlah	6737	100%

Sumber : Kantor Desa Tasik Serai 2014

Berdasarkan table di atas dapat di lihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk di Desa Tasik Serai adalah berjumlah sebanyak 6737 jiwa. Dan dapat di lihat juga antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya iyaitu berjumlah relative seimbang. Jumlah penduduk laki-laki adalah 3557 jiwa dan jumlah penduduk perempuannya 3200 jiwa, untuk lebih jelasnya komposisi penduduk menurut jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table.1.5 Jumlah Penduduk di Rinci berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

No	Dusun	Jumlah			
		Laki-laki	Persentase	Perempuan	Persentase
1	Pintu Padang/ Seigeroggang	1091	30,67%	1024	32%
2	Bringin	620	17,43%	558	17,43%
3	Bagan Benio	259	7,28%	216	6,75%
4	Sungai Buluh	686	19,28%	569	17,78%
5	Jambu Wagi	901	25,33%	833	26,03%
	Jumlah	3557	100%	3200	100%

Sumber : Kantor Desa Tasik Serai 2014

Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa juga belum transparan kepada masyarakat. Hal ini di tunjukan dengan belum adanya laporan pertanggung jawaban kinerja pemerintahn desa kepada masyarakat. Ketrasparan ini sangat perlu dilakukan agar masyarakat percaya terhadap kinerja pemerintahanya. Padahal kepala desa merupakan pemegang tunggal fungsi eksekutif tertinggi di desa yang memegang peran penting dalam menjalankan urusan pemerintahan desa. Kinerja Kepala Desa disini menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi desa, yaitu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Lebih lanjutnya, belum lengkapnya sarana dan prasarana, serta kurangnya tenaga pegawai yang mendukung setiap kegiatan pelayanan di kantor pemerintahan desa sebagai penyebab kegiatan belum maksimal.

Dalam hal ini fungsi pengawasan dianggap penting dan perlu karena untuk memperbaiki setiap masalah yang terjadi di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Pengawasan disini perlu mendapatkan respon positif agar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekeliruan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti dengan maksud dapat memperbaiki kinerja desa dalam mencapai tujuan. Disinilah peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus sebagai wahana demokrasi. Upaya pengawasan dimaksud untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan penjelesan diatas, hal ini menjadi salah satu alasan dan pendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintahan desa dalam penyelenggaran pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau hanya menimbulkan masalah lain di desa.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang di dapat oleh peneliti bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini terlihat dari tugas pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat dari Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam undang-undang tentang BPD masih terkesan hanya sekedar organisasi saja. Hal tersebut ditunjukan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kinerja pemerintahan dalam peneyelenggara pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis juga belum maksimal dalam memeperbaiki kinerja kepala desa yang belum trasparan kepada masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekurangan tegas dan sifat apatis anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis juga menjadi penghambat dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini dapat diketahui ketika kepala desa terjerat masalah hukum pada bulan februari 2014 dan harus berurusan dengan Pihak Keamanan, dan terjadi pergantian menjadi PLH selama masa 6 bulan dan sekarang di pegang oleh Pjs. Seharusnya dengan melihat kompleks permasalahan di Desa Tasik Serai Kcamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai pegawai pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas yang di paparkan oleh penulis, maka atas dasar itu penulis mau melakukan penelitian ilmiah dengan mengangkat suatu judul penelitian “ *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor penghambat yang ditemukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Dalam Melakukan Pengawasan.

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang akan menjadi tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang ditemukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat secara praktis
 1. Sebagai bukti akhir dalam menyelesaikan studi akhir sarjana dan bukti keahlian penulis yakni bidang Ilmu Administrasi Negara.
 2. Sebagai masukan dan kontribusi bagi pemerintahan atau masyarakat di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- b. Manfaat secara teoritis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian ini dapat menyambung karya ilmiah dan kepustakaan baru dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.
2. Sebagai referensi bagi peneliti yang berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih focus, maka penulis mengklasifikasi penelitian ini menjadi enam bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dikemukakan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini hipotesa serta variable penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tata cara penulisan dilakukan yang meliputi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM ISTANSI

Pada bab ini diuraikan sejarah singkat berdirinya Desa, struktur organisasi BPD, beserta aktivitas kegiatan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan beserta keadaan geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi peneliti.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang mendeskripsikan hasil temuan penelitian dan pembahasan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

